



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Nomor : 37/KPN.W14-U32/KP.04.6/I/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

- Memperhatikan : Rapat Pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 08 Januari 2025;
- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan melayani ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- c. Bahwa pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat Pembangunan Zona Integritas tanggal 08 Januari 2025 didasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan ;
- d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERADILAN NEGERI BANGKALAN
- Kesatu : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi;
- Kedua : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wlayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Mmeberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi meonitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ;

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 08 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
DANANG UTARYO



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN
NOMOR : 37/KPN.W14-U32/KP.04.6/I/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan
Ketua : Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M.
Koordinator Teknikal : Sru Handaru, S.H.
Koordinator Operasional : Adi Sutrisno, S.Sos.

1. Komponen Manajemen Perubahan

1.	Kordinator Area	Armawan, S.H.,M.H.	Hakim
2.	Sekretaris	Hosnol Bakri, S.H.	Plh.Panitera Muda Perdata
3.	Anggota	H. Muhammad Hamdi, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	Hilda Mega Cahyani, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata
5.	Anggota	Adnan Rosyid Ridho, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata
6.	Anggota	Khowailid Fadli	Staf Kepaniteraan Perdata

2. Komponen Penataan Tatalaksana

1.	Kordinator Area	Kadek Dwi Krisan Ananda, SH., M.Kn.	Hakim
2.	Sekretaris	Rr. Indah Fitriastuti, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Anggota	Suriyah	Staf Umum dan Keuangan
4.	Anggota	Mohan Yusuf Sigalingging, A.Md	Staf Umum dan Keuangan
5.	Anggota	Moh. Amin	Staf Umum dan Keuangan
6.	Anggota	Muhammad Bin Rachmad	Staf Umum dan Keuangan
7.	Anggota	Saiful Rohman	Staf Umum dan Keuangan

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

1.	Kordinator Area	Benny Haninta Surya, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	Fariza Agustia, SE	Kasubbag Kepegawaian
3.	Anggota	Andi Dewi Sartika, S.H.	Panitera Pengganti

4.	Anggota	Guyub Ishartanto	Staf Kepegawaian
5.	Anggota	Chairul Sholeh	Staf Kepegawaian

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

1.	Kordinator Area	Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,M.Kn.	Hakim
2.	Sekretaris	Muhammad Amir Hamzah, S.H	Kasubag PTIP
3.	Sekretaris	Sofyan Rusliyanto, S.H	Panitera Pengganti
4.	Anggota	Moh. As`ari, S.H.	Panitera Pengganti
5.	Anggota	Niken Hartati, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum
5.	Anggota	Sumantri	Staf PTIP
6.	Anggota	Irwin Budi Anggara, S.H.	Staf PTIP

5. Komponen Penguatan Pengawasan

1.	Kordinator Area	Wienda Kresnanyo, S.H., M.H	Hakim
2.	Sekretaris	Akhmad Taufik, S.H	Panitera Muda Pidana
3.	Anggota	Hairus Salam, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	Lily Djohan Nandari, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana
5.	Anggota	Yulinda Sholikhatul Amalia, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana
6.	Anggota	R. Rina Noerfita Sari, S.E.	Staf Kepaniteraan Pidana
7.	Anggota	Miftahol Kholis, S.H	Staf Kepaniteraan Pidana
8.	Anggota	Mohammad Zaqie Farhan	Staf Kepaniteraan Pidana

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.	Kordinator Area	Benny Haninta Surya, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	Abdoel Rachman, S.H	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	Effri Mayasari, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum
4.	Anggota	Naruddin, S.H	Panitera Pengganti
5.	Anggota	Khalis Rusli, S.H.	Jurusita
6.	Anggota	Subandriyo	Staf Kepaniteraan Hukum
7.	Anggota	Subaidi, S.H	Staf Kepaniteraan Hukum

Ditetapkan di : Bangkalan
 Pada Tanggal : 08 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
DANANG UTARYO